

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran VII



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 telah tersusun.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dan 2026 merupakan tahap transisi dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan RPJPN 2025-2045, Ranwal RPJMN 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Rancangan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, RPD Kota Salatiga tahun 2023- 2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 dan Perwali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 ini memperhatikan arah kebijakan dan perencanaan serta proyeksi penganggaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2026. Diharapkan nantinya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi dasar Rencana Kerja APBD Tahun 2026.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Salatiga, Agustus 2025
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA SALATIGA

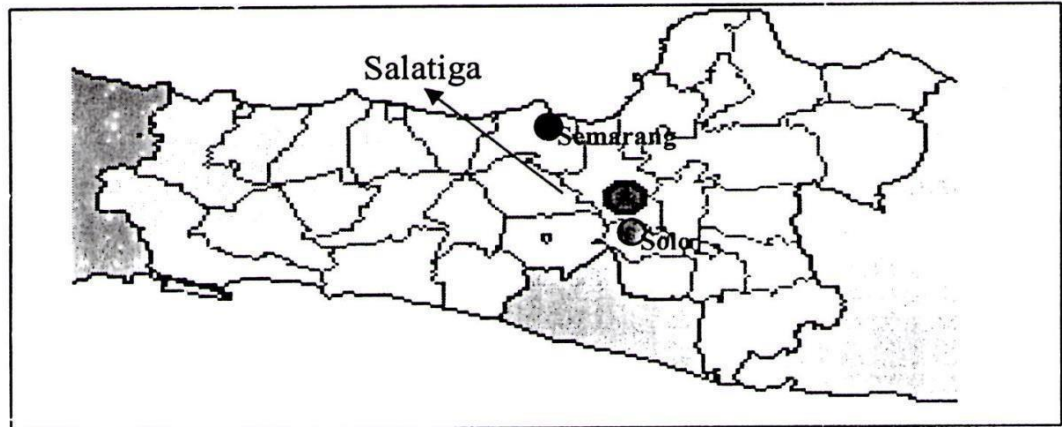
SURYANA ADI SETIAWAN ,ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196802051998031000

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Salatiga merupakan kota kecil yang mempunyai potensi luar biasa mengingat letak geografis dan kondisi demografisnya, sehingga Kota Salatiga mempunyai peran yang cukup penting sebagai indikator kondusifitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah



Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur (yang meliputi Kabupaten/Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara inter regional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Pulau Kalimantan. Secara Geografis Kota Salatiga terletak antara $007.17^{\circ}17^0$ sampai $007.17^{\circ}23^0$ Lintang Selatan serta antara $110.27^{\circ}56,81^0$ sampai $110.32^{\circ}4,64^0$ Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450- 825 dari permukaan laut dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang, dengan

luas wilayah $\pm 5.678,110$ Hektar atau $\pm 56,781$ Km yang secara administratif dibagi menjadi 4 Kecamatan dan terdiri dari 23 Kelurahan dengan 1127 RT dan 206 RW. Secara Geografis Kota Salatiga letaknya strategis di antara Kota Semarang dan Kota Solo, yang dikelilingi oleh Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Pegunungan Gajah Mungkur, dan Gunung Ungaran, menjadikan kota ini sebagai kota transit perdagangan, kota transit pariwisata, kota pendidikan, dan kota olahraga. Sebagai kota yang terletak pada lintasan perdagangan JOGLOSEMAR (Jogya, Solo dan Semarang), Kota Salatiga menjadi kota yang demikian pesat kemajuannya dalam perdagangan. Hal ini ditunjang dengan dibangunnya pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Raya II, Pasar Jetis, Pasar Banyuputih. Pada akhir tahun 2023 penduduk Kota Salatiga berjumlah ± 201.369 , dengan ditambah jumlah pendatang keluar masuk setiap hari baik berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh maupun siswa/mahasiswa dari luar kota, maka semakin terlihat aktivitas yang luar biasa pada pusat-pusat perdagangan. Kota Salatiga memiliki iklim sejuk karena terletak di kaki gunung Merbabu dengan ketinggian wilayah antara 450-825 m dpl dengan suhu $\pm 23^{\circ}\text{C}$ – 28°C . Berdasarkan relief, Kota Salatiga terdiri dari 3 bagian yaitu daerah bergelombang sebanyak 9 kelurahan ($\pm 65\%$), daerah miring sebanyak 10 kelurahan ($\pm 25\%$) dan daerah datar sebanyak 4 kelurahan ($\pm 10\%$).

Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat salah satunya dapat diukur dari kinerja pelayanan publik. Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, disebutkan bahwa salah satu misi Kota Salatiga yang berkaitan dengan bidang pemerintahan umum adalah mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggung jawab dan berkeadilan. Adapun tujuan Kota Salatiga yang berkaitan dengan bidang pemerintahan umum adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan. Sasarannya adalah meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif, menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai

dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik.

Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam Rencana Kerja, terdapat program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan. Program-program tersebut diperoleh dengan membandingkan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan dari Pemerintah Kota Salatiga. Setelah itu, akan dihasilkan program-program prioritas yang akan dijadikan rencana pembangunan Kota Salatiga. Rencana Kerja harus mencerminkan prioritas nasional dan daerah, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), baik di level perangkat daerah maupun di tingkat kota.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 berpedoman pada Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan RPJPN 2025-2045, Ranwal RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 dan Perwali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dalam Rancangan RPJPN 2025-2045 visi, misi dan arah pembangunan nasional merupakan produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Secara umum visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan. Kemudian misi yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik adalah memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial, budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam. Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. System politik berjalan dengan Lembaga perwakilan, system pemilu dan partai politik yang mampu memperkuat system presidensial. Sebagai landasan terwujudnya Indonesia Emas, 2045, ketahanan sosial,

budaya dan ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang salah satunya diarahkan pada terwujudnya beragama maslahat, Kemudian arah tujuan pembangunan beragama maslahat dan berkebudayaan maju dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan baseline di tahun 2025 adalah 76,77 dan sasaran di tahun 2045 adalah 84,2.

Pada Ringkasan Ranwal RPJMN 2025-2029, dengan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik yang didukung oleh 320 Program Kerja. Misi Presiden yang dituangkan menjadi prioritas nasional yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik yaitu Asta Cita 1 yang menyebutkan bahwa memperkuat Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Asta Cita 7 menyebutkan bahwa memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan dan Asta Cita 8 yang menyebutkan bahwa memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian di dalam konteks reformasi politik, terdapat 4 (empat) isu/tantangan dan peluang yaitu : biaya politik yang tinggi, pendanaan partai politik belum memadai, tata kelola partai politik belum memadai dan penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi electoral serta amanat MK yang final dan mengikat. Kemudian sasaran utamanya adalah terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan system anti korupsi dengan indikator Indeks Integritas Partai Politik dengan baseline di tahun 2025 adalah 52-57 dan target di tahun 2029 adalah 59-65.

Pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, terdapat 10 program prioritas Pj Gubernur Jawa Tengah. Kebijakan pembangunan diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Program prioritas yang berkaitan dengan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik adalah program 2 yaitu menjaga stabilitas sosial,

ekonomi politik, keamanan dan ketertiban. Adapun salah satu isu strategis adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat. Terdapat 8 misi untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, salah satunya ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan highlight arah kebijakan transformasi di bidang tersebut adalah pengembangan kawasan strategis agrikultur Dieng-Serayu, Jratunseluna, dan Bengawan Solo Brantas dan Perlindungan pesisir utara Jawa dan konservasi lahan kritis di Jawa Tengah. Salah satu sasaran pokok yang ditetapkan adalah terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah yang kemudian diintegrasikan ke arah pembangunan ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah mengacu pada RPD sebagai masa transisi perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 adalah “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”. Adapun visi misi Wali Kota Salatiga Tahun 2025-2029 terpilih adalah “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinasmis dan Adaptif menuju Salatiga yang mendunia”. Kota Salatiga menjadi daerah yang periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerahnya akan berakhir pada tahun 2025. Karena itu Pemerintah Kota Salatiga memulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara jangka waktu, RPJPD akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan pimpinan daerah terpilih. Sesuai dengan waktu pelaksanaannya, RPJPD Kota Salatiga mengacu rencana pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun mulai dari tahun 2025-2045. Dengan kata lain, fungsi RPJMD adalah penterjemahan tujuan dan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih dan juga berisi sasaran pokok RPJPD periode yang sama.

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang 4 (empat) tahun. Renstra PD merupakan

penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah. Penyusunan RPD Kota Salatiga juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : "SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN", dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah :

1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi;
3. Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tinggi HAM;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan: pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kota Salatiga dinobatkan menjadi kota paling toleran di Indonesia tahun 2024 oleh SETARA Institute. Kota Salatiga melakukan inovasi progresif dalam pemajuan toleransi. Tahun ini, Salatiga meraih skor 6,544. Unggul tipis dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang berada di peringkat dua dimana meraih skor 6,420. Inovasi yang dihadirkan Salatiga tahun ini berupa produk hukum

promotif terhadap toleransi, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial. Pengukuran Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute bertujuan untuk mendorong kota-kota agar memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif dan kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, serta mengukur tingkat toleransi di berbagai kota di Indonesia. Salah satu upaya dalam mengatasi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Pengukuran IKT menggabungkan paradigma hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional. IKT memberikan gambaran tentang kondisi toleransi di berbagai kota dan menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Ada tiga indikator utama yang menilai derajat toleransi tersebut yakni favoritisme pemerintah terhadap kelompok agama tertentu, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan agama, dan regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

Kemudian berkaitan dengan Paskibraka, dimana Purna Paskibraka sangat penting karena mereka berperan sebagai agen perubahan dan teladan bagi generasi muda, khususnya dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Purna Paskibraka juga menjadi wadah pembinaan dan pengembangan potensi anggota, serta mendorong pembaharuan dengan kegiatan konstruktif. Purna Paskibraka ditugaskan untuk menjadi Duta Pancasila, yang berarti mereka harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi purna Paskibraka berperan dalam membentuk karakter anggotanya, menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta semangat gotong royong dan bela negara. Purna Paskibraka menjadi jembatan antara generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Adapun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) adalah rencana aksi yang dibuat di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. RAD PE selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan utama RAD PE adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme, serta menciptakan rasa aman dan damai di daerah. RAD PE juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak atas rasa aman dan perlindungan warga negara yang

diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengoptimalkan pencegahan di daerah dengan mengangkat kearifan lokal dan pelibatan tokoh-tokoh budaya.

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2025 diselaraskan dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi

- organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (diletakkan sesudah Instruksi Presiden);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025- 2045;

39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026;
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2043;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
47. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
50. Perwali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
51. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;
52. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
53. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 adalah :

1. Maksud

1. Memberikan perubahan arah dan landasan penyusunan kebijakan kinerja bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
2. Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target - target kinerja;
3. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi misi Kota Salatiga yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah.

2. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
- b. Memudahkan jajaran pejabat struktural dalam memahami, menilai dan menetapkan arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas;
- c. Tersedianya dokumen dan acuan resmi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga serta sebagai dasar menentukan prioritas dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025;
- d. Menyediakan informasi dalam pemenuhan laporan evaluasi dan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dengan mengacu pada realisasi tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD disajikan dalam tabel 1 (Tabel E.81). Sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja disajikan dalam tabel 2 (tabel e.70). Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 10,06%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai 30,75%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mencapai 95,82%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 12,04%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 77,27%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 11,83%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 9,25%
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai 2,7%
9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mencapai 3,83%
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai 0,46%
11. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mencapai 1,04%
12. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mencapai 9,76%

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Potensi Kota Salatiga dengan kondisi geografis dan demografis yang demikian kompleks, sangat rentan terhadap permasalahan-permasalahan sosial politik yang harus dapat diantisipasi melalui kebijakan yang bersifat makro maupun mikro. Besar kecilnya potensi bangsa ini secara umum yang telah juga didera krisis multi dimensi ditambah dengan krisis ekonomi global. Lemahnya kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat tidak merata harus diikuti dengan melemahnya semangat Nasionalisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai kewenangan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1. Potensi konflik horizontal, dikarenakan karakteristik wilayah dengan kemajemukan budaya etnis dan agama;
- 2. Bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya pada generasi muda.

Badan Kesbangpol perlu melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi saat ini guna mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Potensi Konflik Yang masih cukup Tinggi	Karakteristik Wilayah dengan Kemajemukan Budaya, etnis dan agama	Masih munculnya konflik dan terorisme
			Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
			Belum optimalnya Penanaman nilai Toleransi antar umat Beragama
2	Penyalahgunaan Narkoba	Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat utamanya generasi muda	Belum Optimalnya Kegiatan/Penyuluhan tentang Bahaya dan dampak Narkoba

Kemudian isu – isu penting tersebut apabila dihubungkan dengan visi dan misi kepala daerah yang terkait dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Salatiga dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka akan berpengaruh pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri daerah (wawasan kebangsaan, nasionalisme, partisipatif masyarakat dalam pembangunan), pengembangan pemahaman politik melalui budaya politik demokratis yang santun dan mengedepankan supremasi hukum (pendidikan politik masyarakat dan pembinaan

partai politik), pengembangan penanganan atas penyandang masalah kesejahteraan sosial (penanganan konflik sosial, dan kesenjangan sosial), pemenuhan kebutuhan dasar (keamanan dan ketertiban).

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan pelayanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dan sistem manajemen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, bahwa ada beberapa faktor yang timbul yaitu :

1. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan mitra kerja
- Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur di antaranya dengan semakin dikembangkannya kegiatan pengembangan kompetensi

b. Tantangan

- Perkembangan teknologi di bidang pelayanan
- Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan
- Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani
- Berkembangnya kemampuan dan kesadaran akan hak-hak masyarakat untuk berbicara

- Semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, pandangan, ide, aspirasi karena tersedianya berbagai platform dan mekanisme untuk menyalurkan pendapat tersebut, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran komunikasi.

2. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Peran Utama Lembaga yang sangat strategis dalam Pengembangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Etos Kerja dan Motivasi yang cukup tinggi
- Struktur Organisasi
- SOP yang lengkap dan rinci
- Program Kerja yang tepat sasaran
- TPP sebagai pemberian imbalan jasa yang dikaitkan dengan penilaian kinerja

b. Kelemahan

- Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang terampil
- Fasilitas Pendukung yang kurang memadai

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Diperlukannya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Diperlukannya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. Diperlukannya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan :
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Diperlukannya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan kegiatan :
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Diperlukannya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan :
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kegiatan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kegiatan ini bertujuan memberikan kejelasan arah kebijakan perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Adapun telaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dari Perubahan Rencana Kerja terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan Rencana Kerja berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan

kegiatan, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program dan kegiatan yang diusulkan dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renja Tahun 2025.

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai Pancasila, dimana target kinerja sebelum Renja Perubahan adalah 70% dan mengalami penurunan menjadi 60% dengan analisa bahwa penurunan target dikarenakan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dimana dengan adanya optimalisasi anggaran untuk mencapai efisiensi belanja dimana Inpres ini menekankan pentingnya fokus pada kinerja pelayanan publik dan output yang terukur dalam penggunaan anggaran. Namun realita di lapangan, seharusnya semakin bervariasi kegiatan dan sasaran kegiatan seperti sosialisasi, revitalisasi, lomba, dan paskibraka sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian pada Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator kinerja prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba dimana target kinerja sebelum Renja Perubahan adalah 8% dan mengalami penurunan menjadi 6% dengan analisa bahwa Kasus peredaran narkoba di Kota Salatiga meningkat selama periode 2024. Peningkatan itu terjadi karena Salatiga menjadi tempat transit, tempat persinggahan para pengedar narkoba maupun bertransaksi. Penyebab kenaikan penggunaan narkoba di Salatiga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Faktor Internal : Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, tekanan batin, dan rasa ingin tahu yang tinggi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penggunaan narkoba.
- Faktor Eksternal : Pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, dan mudahnya akses terhadap narkoba dapat meningkatkan risiko penggunaan narkoba. Kurangnya Pengawasan, yaitu lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba dapat memperburuk situasi, masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan disfungsi keluarga dapat meningkatkan risiko penggunaan narkoba. Kemudian pada Program Peningkatan

Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial dimana target kinerja sebelum Renja Perubahan adalah 35% dan mengalami penurunan menjadi 25% dengan analisa bahwa beberapa faktor yang mungkin berkontribusi meliputi peningkatan inflasi, terutama yang disebabkan oleh kenaikan harga cabai, serta perkembangan sistem sosial masyarakat yang lebih maju dibandingkan daerah lain, yang dapat memicu kesadaran dan potensi konflik yang lebih besar. ketidaksiapan Salatiga menghadapi dinamika kota yang semakin sibuk juga bisa menjadi faktor pemicu. Masyarakat Salatiga yang lebih maju dalam hal pengetahuan dan kesadaran sosial, bisa jadi lebih mudah menyadari dan mempermasalahkan berbagai ketidakadilan atau masalah sosial, sehingga meningkatkan potensi konflik

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10. a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10. b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

10. c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10. d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indikator : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, target : 1,7
2. Indikator : terselesaikannya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya, maupun politik, target : 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		(13)=(6)+(12)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	5.457.780.000	171,56	11.496.447.317	85	5.427.780.000		1.589.571.056		1.382.577.833			0	2.972.148.889	171,6	14.468.596.206	201,8	265,10%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	15.000.000	179,66	13.987.600	100	15.000.000		955.500			0		0	955.500	179,7	14.943.100	179,7	99,62%			
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	15.000.000	18,00	13.987.600	8	15.000.000		955.500			0		0	955.500	18	14.943.100	225	99,62%			
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.865.000.000	184,43	8.843.160.952	100	4.869.280.000		1.250.903.854		1.159.408.379			0	2.410.312.233	184,4	11.253.473.185	184,4	231,31%			
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35	4.865.000.000	62,00	8.799.671.452	35	4.852.000.000		1.245.863.854		1.155.088.379			0	2.400.952.233	62	11.200.623.685	177,1	230,23%			
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	17.280.000	2,00	43.489.500	1	17.280.000		5.040.000		4.320.000			0	9.360.000	2	52.849.500	200	305,84%			
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100	18.000.000	200,00	54.431.275	100	18.000.000		28.750.000			0		0	28.750.000	200	83.181.275	200	462,12%			
1.3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	18.000.000	3,00	54.431.275	1	18.000.000		28.750.000			0		0	28.750.000	3	83.181.275	300	462,12%			
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	287.000.000	200,00	1.243.774.657	100	284.500.000		98.497.300		151.849.480			0	250.346.780	200	1.494.121.437	200	520,60%			

1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.500.000	2,00	24.385.083	1	4.500.000		9.128.000		0				0	9.128.000	2	33.513.083	200	744,74%	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1	2.500.000	4,00	27.417.200	1	2.500.000		0		0					0		27.417.200		1096,69%	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	6.500.000			1	6.500.000		6.863.100		500.000				0	7.363.100	0	7.363.100	0	113,28%	
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4	55.000.000	13,00	131.726.900	4	55.000.000		17.358.100		2.453.200				0	19.811.300	13	151.538.200	325	275,52%	
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	9.500.000	4,00	27.077.900	2	9.500.000		9.228.100		157.500				0	9.385.600	4	36.463.500	200	383,83%	
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.500.000	2,00	2.020.000	1	1.500.000		390.000		390.000				0	780.000	2	2.800.000	200	186,67%	
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	210.000.000	2,00	1.031.147.574	1	205.000.000		55.530.000		148.348.780				0	203.878.780	2	1.235.026.354	200	588,11%	
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	45.000.000	100,00	345.962.500	100	35.000.000		147.585.000		0				0	147.585.000	100	493.547.500	100	1096,77%	
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	45.000.000	12,00	345.962.500	6	35.000.000		147.585.000		0				0	147.585.000	12	493.547.500	200	1096,77%	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	61.000.000	197,19	247.155.328	100	61.000.000		27.938.602		58.519.774				0	86.458.376	197,2	333.613.704	197,2	546,91%	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	1.000.000	2,00	2.000.000	1	1.000.000		900.000		0				0	900.000	2	2.900.000	200	290,00%	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12.500.000	3,00	42.148.758	1	12.500.000		7.598.602		7.352.169				0	14.950.771	3	57.099.529	300	456,80%	
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	47.500.000	2,00	203.006.570	1	47.500.000		19.440.000		51.167.605				0	70.607.605	2	273.614.175	200	576,03%	
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	161.000.000	200,00	747.975.005	1	145.000.000		34.940.800		12.800.200				0	47.741.000	200	795.716.005	200	494,23%	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	98.000.000	14,00	265.758.605	1	98.000.000		29.980.800		12.800.200				0	42.781.000	14	308.539.605	233,3	314,84%	
1.7.2		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	15.000.000	0,00	0	100	0	0	0		0				0	0	0	0	0	0,00%	
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	23.000.000	3,00	53.370.000	6	22.000.000		4.960.000		0				0	4.960.000	3	58.330.000	75	253,61%	
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25.000.000	2,00	428.846.400	1	25.000.000	0	0		0				0	0	2	428.846.400	200	1715,39%	

2	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	75	202.000.000	83,77	1.592.533.400	70	201.500.000	26.465.000	45.146.500	0	71.611.500	83,77	1.664.144.900	111,7	823,83%	
2.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	400	115.000.000	370,00	874.678.800	400	115.000.000	26.465.000	45.146.500	0	71.611.500	370	946.290.300	92,5	822,86%	
2.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	200	68.500.000	190,00	172.658.400	200	68.000.000	10.425.000	4.711.500	0	15.136.500	190	187.794.900	95	274,15%	
2.1.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	200	18.500.000	250,00	1.395.925.000	200	18.500.000	0	0	0	0	250	1.395.925.000	125	7545,54%	
2.1.3		Pembentukan Paskibraka		0	0	0	0	0	0	16.040.000	40.435.000		56.475.000		56.475.000		#DIV/0!	
3	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	100	761.043.964	100,00	20.333.415.700	100,00	761.043.964	32.128.400	14.740.000	0	46.868.400	100	20.380.284.100	100	2677,94%	
3.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11	761.043.964	3,00	20.333.415.700	11	761.043.964	32.128.400	0	0	32.128.400	3	20.365.544.100	27,27	2676,00%	

3.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7	658.043.964	7,00	19.717.890.700	7	658.043.964						0	0	7	19.717.890.700	100	2996,44%	
3.1.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	200	83.000.000	100,00	591.433.100	200	83.000.000		32.128.400		9.800.000		0	41.928.400	100	633.361.500	50	763,09%	
3.1.3		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8	20.000.000	7,00	24.091.900	8	20.000.000				4.940.000		0	4.940.000	7	29.031.900	87,5	145,16%	
4	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	47,5	1.096.925.408	62,16	2.876.731.300	45	1.098.906.036		6.856.600		1.402.775.000		0	1.409.631.600	62,16	4.286.362.900	130,9	390,76%	
4.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi	15	1.096.925.408	12,00	2.876.731.300	15	1.098.906.036		6.856.600		1.402.775.000		0	1.409.631.600	12	4.286.362.900	80	390,76%	
4.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	80	985.000.000	100,00	2.773.154.600	70	985.000.000		4.309.900		1.402.775.000		0	1.407.084.900	100	4.180.239.500	125	424,39%	

4.1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	27.500.000	2,00	45.831.700	2	27.000.000		2.546.700						0	2.546.700	2	48.378.400	100	175,92%	
5	Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	10	342.200.000	0,00	280.965.500	45	342.200.000		2.900.000		-2.900.000				0	0	0	280.965.500	0	82,11%	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	56		77,90		54															
5.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	28	342.200.000	56,00	280.965.500	30			2.900.000		0				0	2.900.000	56	283.865.500	200	82,95%	
5.1.1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika,fasilitasi Kerukunan Umat	2	330.200.000	2,00	144.325.500	2	330.200.000		2.900.000		0				0	2.900.000	2	147.225.500	100	44,59%	
5.1.2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	-330.200.000	2,00	8.866.250	2	12.000.000	0			0				0	0	2	8.866.250	100	-2,69%	
6	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	50	805.980.628	16,00	1.270.855.500	35	789.000.000		84.810.000		181.435.500				0	266.245.500	16	1.537.101.000	32	190,71%	
6.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun	7	805.980.628	8,00	1.270.855.500	8	789.000.000		84.810.000		181.435.500				0	266.245.500	8	1.537.101.000	114,3	190,71%	

6.1.1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	345.000.000	1,00	544.012.700	1	345.000.000		15.045.000		143.121.000				0	158.166.000	1	702.178.700	100	203,53%	
6.1.2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2	50.980.627	2,00	61.860.000	2	39.000.000		1.295.000		10.945.000				0	12.240.000	2	74.100.000	100	145,35%	
6.1.3		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	21.000.000	100,00	64.432.200	70	20.000.000		0		16.914.500				0	16.914.500	100	81.346.700	142,9	387,37%	
6.1.4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	32	186.000.000	67,00	304.350.000	32	185.000.000		39.800.000		0				0	39.800.000	67	344.150.000	209,4	185,03%	

[illegible]

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan Perubahan Renja		
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 skor	5.427.780.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 skor	6.259.254.697,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	15.000.000	Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.900.000,00
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	15.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	5.900.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.869.280.000	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.080.479.273,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang	4.852.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang	5.060.319.273,00
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	17.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.160.000,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	18.000.000	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	29.000.000,00
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18.000.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.000.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	284.500.000	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	408.744.800,00
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.194.000,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	2.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	0,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.500.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.022.200,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	55.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	63.467.700,00

1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dokumen	9.500.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dokumen	20.156.400,00
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Laporan	1.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Laporan	1.040.000,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	%	205.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	%	283.864.500,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Unit	35.000.000	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Unit	188.324.500,00
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	%	35.000.000	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	%	188.324.500,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Laporan	61.000.000	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Laporan	236.255.226,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	Laporan	980.000,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	12.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	40.290.000,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	%	47.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	%	194.985.226,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Unit	145.000.000	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Unit	310.550.898,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	98.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	171.686.000,00
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Unit	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Unit	0,00
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	22.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	41.808.000,00
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	%	25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	%	97.056.898,00
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai- nilai Pancasila	70	Orang	201.500.000	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai- nilai Pancasila	70	Orang	701.754.500,00
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai	400	Orang	115.000.000	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai	400	Orang	701.754.500,00

	Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa			Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa		
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	200	Orang	68.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	200 Orang 30.868.000,00
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	200	%	18.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	200 % 670.886.500,00
2.1.3	Pembentukan Paskibraka		0	Kegiatan	0		0 Kegiatan 812.309.016,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	100	Partai	761.043.964	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	100 Partai 812.309.016,00
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11	Orang	761.043.964	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11 Orang 720.084.016,00
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7	Laporan	658.043.964	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7 Laporan 77.850.000,00
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	200	%	83.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	200 % 14.375.000,00

	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8	Ormas	20.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8	Ormas	1.479.442.000,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	45	Orang	1.098.906.036	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	45	Orang	1.479.442.000,00
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi	15	Laporan	1.098.906.036	Jumlah Ormas yang terfasilitasi	15	Laporan	1.462.688.000,00
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	70	%	985.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	70	%	16.754.000,00
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	nilai	27.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	nilai	196.916.115,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	45	Kasus	342.200.000	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	45	Kasus	196.916.115,00
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	54	Dokumen		Indeks Kerukunan Umat Beragama	54	Dokumen	191.187.425,00
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30	Dokumen		Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30	Dokumen	5.728.690,00
5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba,fasilitasi Kerukunan Umat	2	%	330.200.000	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba,fasilitasi Kerukunan Umat	2	%	794.970.600,00

5.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	Potensi	12.000.000	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	Potensi	794.970.600,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	35	Dokumen	789.000.000	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	35	Dokumen	338.334.000,00
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun	8	Dokumen	789.000.000	Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun	8	Dokumen	55.710.000,00
6.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Orang	345.000.000	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Orang	38.152.600,00
6.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2	Orang	39.000.000	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2	Orang	169.280.000,00
6.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	Laporan	20.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	Laporan	29.820.000,00

6.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	32	Dokumen	185.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	32	Dokumen	163.674.000,00
-------	--	---	----	---------	-------------	---	----	---------	----------------

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 terdiri atas 6 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas dengan alokasi belanja operasi terdiri dari :

- i. belanja pegawai sebesar Rp 5.060.319.273,00
- ii. belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.879.454.939,00
- iii. belanja hibah sebesar Rp 2.116.548.216,00
- iv. belanja modal sebesar Rp 188.324.500,00
- v. pagu keseluruhan sebesar Rp 10.244.646.928,00

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga periode tahun 2025 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sedangkan keluaran sub kegiatan disesuaikan dengan visi, misi, strategi dan tujuan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Renstra yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- iv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - i. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - ii. Pembentukan Paskibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - i. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

ii. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

iii. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

i. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ii. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

i. Penyusunan Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ii. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- i. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ii. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- iii. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di DaerahPelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
- iv. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- v. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- vi. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : KOTA SALATIGA

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR RKPD TAHUN 2024	Satuan	KINERJA PROGRAM			
			Tahun 2024		Kinerja 2025	
			Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	84,75	85,49	85	85
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	65	84,38	70	60
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
a.	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
a.	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	42,5	62,16	45	45
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
a.	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	6	0	8	6
b.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	52	78,98	54	54
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
1	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	25	0	35	25

ULASAN TERKAIT PERUBAHAN TARGET KINERJA

1. NAMA PROGRAM	: PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Indikator	: Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai - Nilai Pancasila
Target tahun 2024	: 65%
Realisasi tahun 2024	: 84,38%
Target sebelum perubahan 2025	: 70%
Target setelah perubahan 2025	: 60%
Ulasan perubahan target	: Penurunan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dimana nilai-nilai Pancasila memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Semakin bervariasi kegiatan dan sasaran kegiatan seperti sosialisasi, revitalisasi, lomba, dan paskibraka sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan telah irasionalisasi sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025

2. NAMA PROGRAM	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Indikator	: Prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba
Target tahun 2024	: 6%
Realisasi tahun 2024	: 0%
Target sebelum perubahan 2025	: 8%
Target setelah perubahan 2025	: 6%
Ulasan perubahan target	: Kasus peredaran narkoba di Kota Salatiga meningkat selama periode 2024. Peningkatan itu terjadi karena Salatiga menjadi tempat transit, tempat persinggahan para pengedar narkoba maupun bertransaksi. Penyebab kenaikan penggunaan narkoba di Salatiga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : - Faktor Internal : Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, tekanan batin, dan rasa ingin tahu yang tinggi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penggunaan narkoba. - Faktor Eksternal : Pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, dan mudahnya akses terhadap narkoba dapat meningkatkan risiko penggunaan narkoba. - Kurangnya Pengawasan : Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba dapat memperburuk situasi. - Masalah Sosial : Masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan disfungsi keluarga dapat meningkatkan risiko penggunaan narkoba

3. NAMA PROGRAM	: PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Indikator	: Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial
Target tahun 2024	: 25%
Realisasi tahun 2024	: 0%
Target sebelum perubahan 2025	: 35%
Target setelah perubahan 2025	: 25%
Ulasan perubahan target	:

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi meliputi peningkatan inflasi, terutama yang disebabkan oleh kenaikan harga cabai, serta perkembangan sistem sosial masyarakat yang lebih maju dibandingkan daerah lain, yang dapat memicu kesadaran dan potensi konflik yang lebih besar. ketidaksiapan Salatiga menghadapi dinamika kota yang semakin sibuk juga bisa menjadi faktor pemicu. Masyarakat Salatiga yang lebih maju dalam hal pengetahuan dan kesadaran sosial, bisa jadi lebih mudah menyadari dan mempermasalahkan berbagai ketidakadilan atau masalah sosial, sehingga meningkatkan potensi konflik

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SALATIGA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	85 %	6.942.168.091,00	5.729.518.597,00	6.259.254.697,00	-1.472.888.091,00							5.469.280.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %	9.500.000,00	9.500.000,00	5.900.000,00	-3.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Badan Kesbangpol Kota Salatiga		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	5.900.000,00	-3.600.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	5.198.564.589,00	4.067.364.252,00	5.080.479.273,00	-118.085.316,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Badan Kesbangpol Kota Salatiga		4.882.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	5.178.224.589,00	4.047.204.252,00	5.060.319.273,00	-117.905.316,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			4.865.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20.340.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-180.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			17.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	30.004.000,00	30.004.000,00	29.000.000,00	-1.004.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Badan Kesbangpol Kota Salatiga		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.004.000,00	30.004.000,00	29.000.000,00	-1.004.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	816.771.602,00	817.771.802,00	408.744.800,00	-408.026.802,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Badan Kesbangpol Kota Salatiga		287.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.194.000,00	20.194.000,00	20.194.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.546.000,00	20.015.800,00	20.022.200,00	476.200,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	84.900.400,00	85.430.800,00	63.467.700,00	-21.432.700,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.156.600,00	22.156.600,00	20.156.400,00	-2.000.200,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			9.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.110.000,00	1.110.000,00	1.040.000,00	-70.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	668.864.602,00	668.864.602,00	283.864.500,00	-385.000.102,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	192.967.800,00	191.009.400,00	188.324.500,00	-4.643.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Badan Kesbangpol Kota Salatiga		45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	192.967.800,00	191.009.400,00	188.324.500,00	-4.643.300,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	260.082.000,00	236.100.000,00	236.255.226,00	-23.826.774,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	-		61.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	980.000,00	-120.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.290.000,00	290.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	218.982.000,00	195.000.000,00	194.985.226,00	-23.996.774,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			47.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	434.278.100,00	377.769.143,00	310.550.898,00	-123.727.202,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	-		161.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	199.516.100,00	199.516.100,00	171.686.000,00	-27.830.100,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			98.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	4 Unit	41.600.000,00	41.600.000,00	41.808.000,00	208.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	178.162.000,00	121.653.043,00	97.056.898,00	-81.105.102,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila				65 %	70 %	990.990.700,00	979.739.100,00	701.754.500,00	-903.990.700,00							87.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa</i>				400 orang	400 orang	990.990.700,00	979.739.100,00	701.754.500,00	-289.236.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Ormas, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat		87.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				200 Orang	200 Orang	129.238.000,00	129.236.400,00	30.868.000,00	-98.370.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			68.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				200 Orang	200 Orang	861.752.700,00	850.502.700,00	670.886.500,00	-190.866.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			18.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan				100 %	100 %	989.987.059,00	838.854.016,00	812.309.016,00	-228.943.095,00							761.043.964,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan</i>				11 kegiatan	11 kegiatan	989.987.059,00	838.854.016,00	812.309.016,00	-177.678.043,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Ormas, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat		761.043.964,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				7 Orang	7 Orang	859.857.859,00	720.084.016,00	720.084.016,00	-139.773.843,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			658.043.964,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				200 Orang	200 Orang	114.514.500,00	104.395.000,00	77.850.000,00	-36.664.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			83.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				8 Laporan	8 Laporan	15.614.700,00	14.375.000,00	14.375.000,00	-1.239.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan				42,5 %	45 %	1.617.864.000,00	1.502.588.000,00	1.479.442.000,00	-605.364.000,00							1.012.500.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Ormas yang terfasilitasi</i>				15 ormas	15 ormas	1.617.864.000,00	1.502.588.000,00	1.479.442.000,00	-138.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Ormas		1.012.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				70 Orang	70 Orang	1.590.000.000,00	1.474.724.000,00	1.462.688.000,00	-127.312.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			985.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	27.864.000,00	27.864.000,00	16.754.000,00	-11.110.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba				6 %	8 %	297.375.960,00	280.025.960,00	196.916.115,00	44.824.040,00							342.200.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba				30 kasus	30 kasus	297.375.960,00	280.025.960,00	196.916.115,00	-100.459.845,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	pelajar dan mahasiswa		342.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	291.647.270,00	274.297.270,00	191.187.425,00	-100.459.845,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			330.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	5.728.690,00	5.728.690,00	5.728.690,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	879.705.620,00	868.689.620,00	794.970.600,00	-73.724.993,00							805.980.627,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	879.705.620,00	868.689.620,00	794.970.600,00	-84.735.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Ormas, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat		805.980.627,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	382.988.000,00	378.722.000,00	338.334.000,00	-44.654.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			345.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	55.710.000,00	55.710.000,00	55.710.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			50.980.627,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				70 Orang	70 Orang	68.242.600,00	61.492.600,00	38.152.600,00	-30.090.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				32 Orang	32 Orang	169.280.000,00	169.280.000,00	169.280.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			186.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.820.000,00	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	173.665.020,00	173.665.020,00	163.674.000,00	-9.991.020,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			168.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		JUMLAH							11.718.091.430,00	10.199.415.293,00	10.244.646.928,00	-1.473.444.502,00							8.478.004.591,00		

BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tri wulan IV tahun 2025 dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang memuat program, kegiatan, *indikator dan target kinerja*, lokasi, kelompok sasaran dan *pagu indikatif* sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

Sekretariat, bidang-bidang, subbidang-subbidang, dan seluruh *pegawai* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan *Perubahan Renja* Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah

ditetapkan, menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan pelaksanaan triwulanan. Kemudian dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah Kota Salatiga, khususnya Forkopimda, lembaga pendidikan, partai politik serta Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Salatiga Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2025 ini disusun agar perencanaan lebih komprehensif dan mampu menjawab isu-isu strategis yang ada di masyarakat, dalam rangka menjabarkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, menjadi acuan kerja bagi pihak terkait, menjadi pedoman penilaian kinerja yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai program dan sasaran pembangunan, menjadi media akuntabilitas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagai pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN